

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG MELALUI SEKTOR  
PARIWISATA DI TAHUN 2021**

<sup>1</sup>Nadia Alliya Sabarina

<sup>2</sup>Ivan Darmawan

<sup>3</sup>Yayan Nuryanto

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjajaran

<sup>2,3</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Padjajaran

Email Korespondensi : [Nayaasabarin@gmail.com](mailto:Nayaasabarin@gmail.com)

**Abstract**

The existence of COVID-19 has had an impact on the contribution of the tourism sector to the Regional Original Revenue of the City of Bandung. The Department of Culture and Tourism seeks to increase tourist visits to the city of Bandung in accordance with the targets to be achieved through the Tourist Destination Attraction Enhancement Program with training activities on the management of tourist destinations, tourist villages. The aim of this research is to find out the role of the Department of Culture and Tourism in running the program as a way to increase the local revenue (PAD) of the City of Bandung in 2021. This type of research uses a descriptive qualitative method. This method is intended to understand what is experienced by research subjects by describing it in the form of words or language

**Keywords: The Role of the Department of Culture and Tourism, Tourism Village, Regional Original Income**

**Abstrak**

Keberadaan COVID-19 memberikan dampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung sesuai dengan target yang hendak dicapai melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan kegiatan pelatihan tata kelola destinasi wisata, kampung wisata. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan program tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung Tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memahami apa yang dialami subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa

**Kata Kunci : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kampung Wisata, Pendapatan Asli Daerah**

## **Latar Belakang**

Pemerintahan daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, berwenang melakukan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Dengan otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan potensi daerah menjadi salah satu alternatif dari sumber pendapatan dan pembiayaan kebutuhan yang dimiliki oleh daerah.

Pembiayaan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sektor pariwisata merupakan sektor potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, mengingat pembangunan pariwisata dijadikan prioritas

utama dalam menunjang pembangunan suatu daerah, memperbaiki perekonomian dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pengembangan daerah yang berpotensi menjadi objek wisata pada era globalisasi saat ini. Kota Bandung merupakan wilayah terbesar sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki topografi unik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam dan budaya. Hal tersebut menjadi salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian daerah dalam sektor pariwisata. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Bab II Pasal 3 tentang kepariwisataan. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group pada tahun 2018, indeks pariwisata Kota Bandung menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 95.30 atau lebih tinggi dari Kota Denpasar dengan Index Pariwisata 87.65 dan Kota Yogyakarta dengan Index Pariwisata 85.68. Pada tahun 2019 sektor pariwisata Kota Bandung sempat mengalami penurunan akibat dari arus penerbangan Bandara Husein sebagian dipindahkan ke Kertajati, meski begitu, di tahun yang sama Kota Bandung meraih penghargaan Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2019 Kategori Kota Besar Terbaik Sektor Pariwisata Indonesia peringkat Gold.

Namun memasuki tahun 2020, secara mengejutkan muncul pandemi COVID-19. Dengan Kota Bandung yang menjadi salah satu daerah dengan kasus infeksi COVID-19 terbanyak di Provinsi Jawa Barat tentu memberikan dampak yang signifikan khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 agar tidak meluas dan menginfeksi banyak masyarakat, berbagai

kebijakan diterapkan. Salah satunya adalah surat edaran Walikota Bandung Tertanggal 31 Maret 2020 Tentang Himbauan untuk Sementara Tidak Melaksanakan Kegiatan Operasional Jasa Usaha Pariwisata dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan COVID-19. Menurut Ridwan Kamil, Kota Bandung menjadi daerah paling anjlok pendapatannya akibat pandemi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung mencatat penurunan jumlah wisatawan nusantara atau domestik yang berkunjung ke Kota Bandung sejak masa pandemi COVID-19. Terjadi penurunan sebesar 50 persen atau berkisar 3,2 juta wisatawan.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan oleh penurunan kontribusi sektor pariwisata karena pandemi COVID-19 tahun 2021.

### **Metode**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Menurut Sugiyono (2017:2) "Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu." Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi secara rinci dan mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis. Metode ini dimaksudkan untuk memahami apa yang dialami subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Dalam penelitian ini juga menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta penelitian ini dilengkapi dengan analisis SWOT.

### **Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Kota Bandung di Tahun 2021 (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2021)**

Peran merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan berdasarkan status kedudukan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mencapai suatu tujuan. Peran disini dilihat dari peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya bagian Sumber Daya, Promosi dan Ekraf, yang dimana akan menentukan bagaimana cara mengatasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh penurunan dari kontribusi pariwisata di tahun 2021 melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah suatu program dengan fokus memberikan pelatihan kepada masyarakat wilayah yang berpotensi menjadi Kampung Wisata untuk selanjutnya dapat memanfaatkan kekayaan dan ciri khas yang dimiliki wilayahnya agar dapat menarik wisatawan sehingga dapat membantu memulihkan ekonomi Kota Bandung.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya, Promosi dan Ekonomi Kreatif. Untuk pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang, dimana ada pengajuan dari tingkat kecamatan yang kemudian masuk ke dalam prioritas atau tidak dan apabila suatu wilayah masuk ke dalam prioritas maka akan di prioritaskan untuk mendapatkan kesempatan pelatihan. Adapun melalui reses atau usulan masyarakat melalui dewan.

Suatu wilayah dapat dikatakan layak disebut kampung wisata apabila dapat memenuhi persyaratan yang ada, persyaratan

tersebut disingkat 5A3P yang mana isi dari persyaratan tersebut adalah:

**1. 5A (Accessibility, Accommodations, Attraction, Activities, Amenities)**

**1) Accessibility**

Accessibility atau aksesibilitas memiliki arti kemudahan untuk mengunjungi wilayah tersebut.

**2) Accomodations**

Accommodations atau akomodasi memiliki arti kemudahan untuk mendapatkan tempat menginap yang layak. Dibutuhkan tempat untuk beristirahat yang aman, bersih, ramah, dan yang terpenting memiliki sanitasi yang sehat sehingga dapat memenuhi persyaratan kesehatan.

**3) Attraction**

Attraction atau atraksi dapat diartikan sebagai kemudahan dalam melihat dan menikmati atraksi khas yang disuguhkan di lokasi wisata. Wilayah dapat disebut kampung wisata apabila memiliki atraksi atau objek wisata yang dikelola, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat, yang layak serta aman untuk dikunjungi wisatawan.

**4) Activities**

Activities atau aktifitas merupakan kemudahan dan adanya sarana fasilitas untuk melakukan suatu kegiatan. Aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan harus layak, dalam arti lain adalah aman dan dapat dipantau keselamatan dari para wisatawan.

**5) Amenities**

Amenities atau amenitas adalah adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang perjalanan wisatawan ke wilayah tersebut.

**2. 3P (Pemberdayaan, Pengelola, Promosi)**

**1) Pemberdayaan**

Dalam hal ini, pemberdayaan berarti memberdayakan masyarakat di wilayah tersebut agar dapat ikut andil dalam melestarikan dan mengembangkan keistimewaan yang dimiliki oleh wilayah tersebut sehingga nantinya dapat diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas.

**2) Pengelola**

Pengelola memiliki peran yang besar dalam mendayagunakan keistimewaan yang dimiliki oleh wilayahnya.

**3) Promosi**

Apabila persyaratan terkait pemberdayaan serta pengelola sudah terpenuhi, masyarakat masih harus memperkenalkan apa yang menjadi ciri khas wilayahnya agar dapat diketahui oleh masyarakat yang lebih luas sehingga dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.

Untuk lebih memperjelas pemaparan di atas mengenai peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung melalui sektor pariwisata tahun 2021, berikut ini adalah hasil penelitian yang telah diuraikan berdasarkan komponen peran yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, sebagai berikut.

### 1. Fungsi Pengaturan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengikuti sistem dan kebijakan yang berlaku pada saat tersebut. Terkait peningkatan ekonomi ada berbagai hal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu promosi, peningkatan kapasitas, kompetensi, penggunaan jasa pariwisata, dsb.

### 2. Fungsi Perumusan Berbagai Jenis Kebijakan

Pelaksanaan kampung wisata berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata. Berdasarkan Pasal I Nomor 10, kampung wisata adalah suatu wilayah di kawasan perkotaan dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mendorong percepatan pengembangan kampung wisata dan tematik yang memadukan potensi sumber daya alam, budaya, dan masyarakat lokal sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat dan berdaya saing. Selain itu bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan kampung wisata yang kreatif, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata perkotaan yang kreatif, berbudaya, dan berakhlak mulia.

### 3. Fungsi Pelayanan

peserta pelatihan di fasilitasi tempat pelatihan yang dilaksanakan di hotel dan berlangsung selama 2 hari. Tidak hanya dilaksanakan di hotel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memberikan kegiatan outing class, tenaga narasumber, tenaga pendamping, juga sedikit transport untuk peserta. Tujuan diberikannya pelayanan-pelayanan tersebut adalah agar mereka memiliki wawasan seperti apa kampung wisata itu sehingga dapat terbentuk sebuah kesan agar mereka bisa termotivasi untuk mengembangkan kampung wisata yang ada di wilayahnya.

### 4. Fungsi Penegakan Hukum

Peserta pelatihan di fasilitasi tempat pelatihan yang dilaksanakan di hotel dan berlangsung selama 2 hari. Tidak hanya dilaksanakan di hotel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memberikan kegiatan outing class, tenaga narasumber, tenaga pendamping, juga sedikit transport untuk peserta. Tujuan diberikannya pelayanan-pelayanan tersebut adalah agar mereka memiliki wawasan seperti apa kampung wisata itu sehingga dapat terbentuk sebuah kesan agar mereka bisa termotivasi untuk mengembangkan kampung wisata yang ada di wilayahnya.

### 5. Fungsi Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Keamanan

Pemeliharaan kampung wisata tidak hanya dilakukan oleh disbudpar melainkan terdapat dinas lainnya seperti dinas UMKM. Pendampingan diberikan setelah pemberian materi, sesudah outing class. Disbudpar mencoba untuk mendampingi masyarakat untuk mengaplikasikan hasil-hasil pelatihan. Namun, setelah

satu bulan tersebut, tanggung jawab pemeliharaan kampung wisata diserahkan sepenuhnya ke wilayah yang bersangkutan, kecuali apabila kampung wisata tersebut didaftarkan untuk menjadi aset Kota Bandung, maka pengelolaan kampung wisata akan dipindah tangankan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

### **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2021**

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 3.972.822 orang, namun berdasarkan Data Perkiraan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung Tahun 2021 hanya sebesar 3.741.680. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 3.244.600. Dari Data Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 mengalami penurunan dari 391.887.844.961 di tahun 2020 menjadi 379.997.973.883. terdapat selisih sebesar 11.889.871.078 dimana kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bandung di tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung yang mengalami peningkatan dari 3.244.600 orang di tahun 2020 menjadi 3.741.680 orang di tahun 2021. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, diantaranya karna di tahun 2021 ada kebijakan pembatasan untuk hotel, tempat hiburan dan restoran, sehingga wisatawan tidak menginap. Adapula kemungkinan wisatawan datang ke Kota Bandung hanya “lewat” saja untuk berkunjung ke Lembang atau Kabupaten Bandung Barat. Dapat dikatakan mereka mengeluarkan uangnya lebih banyak di daerah luar Kota Bandung, misal di Kota

Bandung mereka hanya sebentar, untuk liburan dan menginapnya di Lembang.

Terkait kampung wisata, di tahun 2021 pelatihan dilakukan di 5 kecamatan, diantaranya Cinambo, Ujung Berung, Sukajadi, Lengkong, Cibeunying Kaler, namun hanya kecamatan Cinambo yang diresmikan di tahun 2021. Kendati demikian, kecamatan Cinambo sebagai kampung wisata literasi belum memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandung secara signifikan. Masih banyak yang harus dilakukan agar kampung wisata literasi dapat menarik lebih banyak wisatawan karna setelah pelatihan harus peserta yang mengelola kampung wisatanya sendiri.

Analisis SWOT sederhana dalam Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Melalui Sektor Pariwisata di Tahun 2021

Dalam merumuskan strategi, penulis menggunakan analisis SWOT yang dikemukakan oleh Rangkuti (2002:19) : Merupakan proses kegiatan dalam mengidentifikasi berbagai macam faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) namun bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threat).

#### **Kekuatan (strength)**

- Kebijakan yang jelas
- Kepemimpinan yang mendukung
- Adanya pendampingan terhadap masyarakat

#### **Kelemahan (Weakness)**

- Kurangnya fasilitas yang merata
- Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
- Kurangnya penerapan dari masyarakat

#### **Peluang (Opportunity)**

- Peningkatan PAD

- Potensi objek wisata
- Promosi Kampung Wisata

#### Ancaman (Threats)

- Tidak menjaga konsistensi
- Kurang pemahaman
- Kurang kehadiran Masyarakat

#### a. Strategi SO

1. Meningkatkan keterampilan SDM untuk mengikuti pelatihan yang telah diadakan oleh Disbudpar.
2. Mendapat dukungan dari dinas terkait dan masyarakat

#### b. Strategi ST

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
2. Berkolaborasi dengan dinas terkait dan sektor swasta untuk membuat program dan inisiatif baru di sektor pariwisata.

#### c. Strategi WO

1. Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kampung wisata.

#### d. Strategi WT

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.

a. Upaya mendampingi suatu wilayah kampung wisata secara berkala sampai wilayah tersebut benar-benar dapat berdiri sendiri, selain itu membantu wilayah tersebut mendapatkan koneksi agar masyarakat dapat mewujudkan ide-ide dan harapannya tanpa harus terbebani biaya.

b. Upaya dengan membuat aplikasi atau web yang di khususkan untuk masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan tata kelola destinasi wisata sehingga dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan, menjawab kebingungan serta dapat digunakan juga sebagai forum kampung wisata. Adanya web atau aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat kampung wisata dalam mengembangkan wilayahnya menjadi layak pengunjung.

Berdasarkan solusi dan inovasi tersebut, pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dapat terlaksana dengan optimal, efektif, dan efisien.

#### Simpulan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai Pemerintah Daerah telah secara aktif menunjukkan peran dan upayanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung di tahun 2021 salah satunya melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Di Tahun 2021, hanya satu kecamatan yang diresmikan menjadi kampung wisata, yaitu Kampung Wisata Literasi Cinambo. Namun Kampung Wisata Literasi Cinambo ternyata masih belum dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bandung yang disebabkan oleh wisatawan

#### Upaya Alternatif terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Melalui Sektor Pariwisata Tahun 2021

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Program Peningkatan Destinasi Pariwisata, sebagai berikut :

yang berkunjung ke Kota Bandung tidak menginap atau berlama-lama di Kota Bandung. Dari hal tersebut, menghasilkan suatu strategi yaitu hasil analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) yang diperoleh peneliti dengan menggunakan matriks analisis SWOT menghasilkan suatu strategi untuk meningkatkan sektor pariwisata dengan menggunakan strategi strength-opportunity (SO) yang berada pada posisi kuadran I matriks analisis SWOT yaitu : Meningkatkan keterampilan SDM untuk mengikuti pelatihan yang telah diadakan oleh Disbudpar serta mendapat dukungan dari dinas terkait dan masyarakat serta menggunakan strategi ST (Strength-Threats), yaitu : Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan Berkolaborasi dengan dinas terkait dan sektor swasta untuk membuat program dan inisiatif baru di sektor pariwisata.

#### References:

- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju
- Trisliatanto, Dimas Agung, 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Jaya, Gde Bhaskara Perwira dan Widanta, AA Bagus Putu. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*. E-Journal EP Unud, 3.5.201-208. Universitas Udayana, Bali.
- Muharomah, Siti. 2006. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah Forum Bisnis dan Kewirausahaan. STIE MDP.

- Nugraha, Agus Budi. 2020. *Kontribusi Sektor Pariwisata, Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman*. Master Thesis. UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Nasir, Mohammad Dendi A. Khomariyah, Nunuk. 2020. *Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol 10, No 2.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Bab II Pasal 3 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 3, tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (7).
- Undang-Undang N0.33 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (1).

#### Acknowledgment (Pengakuan):

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, khususnya bagian Sumber Daya, Promosi dan Ekonomi Kreatif beserta informan yang telah memberikan kesempatan dan telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan penelitian dengan memberikan informasi mengenai penelitian ini.